

PEMBATASAN USIA PERKAWINAN DALAM SUDUT PANDANG MAQASHID SYARI'AH AL SYATHIBI

Achmad Kadarisman¹, Tutik Hamidah²

¹STAI Hasan Jufri Bawean dan Hakim PA Bawean, ¹UIN Maulana Malik
Ibrahim Malang

Email: ¹achmadkadarisman@gmail.com, ²tutikhamidah@uin-malang.ac.id

Abstract: In classical jurisprudence there is no age requirement for marriage. Even children who have not reached puberty can be married by their guardians with some conditions. However, nowadays almost all parts of the world, including Indonesia are working hard to limit the age allowed for marriage. Islamic law has a very broad point of view beyond fiqh. The Shari'ah gives the spirit or spirit of welfare for mankind. In this article will examine the urgency of limiting the age of marriage in Indonesia by using the perspective of sharia maqashid according to imam al Syathibi. The results of this study give the reader an understanding that the Republic of Indonesia has made a series of regulations and legislation that remain oriented and aim to realize benefits in line with the concept of maqashid al syariah initiated by Imam Al-Syathibi for the benefit of the future young generation of Indonesia.

Keywords: maqashid syariah, age restriction, marriage dispensation

Abstrak: Dalam fiqh klasik ketentuan umur dibolehkannya melangsungkan perkawinan tidak ada. Bahkan anak-anak yang belum mencapai usia baligh pun bisa dikawinkan oleh walinya dengan beberapa ketentuan. Namun, pada masa sekarang hampir di seluruh belahan dunia, termasuk Indonesia sedang gencar untuk membatasi usia dibolehkannya melakukan perkawinan. Syariat Islam memiliki sudut pandang yang sangat luas melebihi fiqh. Syariat memberikan semangat atau spirit kemaslahatan bagi umat manusia. Dalam artikel ini akan meneliti urgensi pembatasan usia perkawinan di Indonesia dengan menggunakan perspektif maqashid syariah menurut imam al Syathibi. Hasil penelitian ini memberikan pemahaman kepada pembaca bahwa Negara Republik Indonesia telah membuat serangkaian peraturan dan perundang-undangan yang tetap berorientasi dan bertujuan mewujudkan kemaslahatan yang selaras dengan konsep maqashid al syariah yang digagas oleh imam Al-Syathibi demi kebaikan masa depan generasi muda bangsa Indonesia.

Kata kunci: maqashid syariah, pembatasan umur, dispensasi kawin

Pendahuluan

Islam mengatur kehidupan privat manusia yang di antaranya adalah bagaimana manusia melakukan upaya dalam memenuhi kebutuhan biologisnya. Setiap makhluk hidup pasti akan berkembang biak sesuai fisiologi masing-masing. Manusia dalam hal ini memiliki keunikan sendiri yang lain dengan makhluk lainnya. Misalnya, amoeba tidak perlu melakukan perkawinan untuk berkembang biak. Ia cukup membelah dirinya saja.

Jika dikerucutkan perspektif Islam, maka pandangan kita akan kembali pada zaman sebelum Nabi Muhammad SAW menyampaikan wahyu-wahyu Allah SWT. Berdasarkan riwayat dari Aisyah RA pada masa itu di tanah Arab dikenal 4 macam bentuk perkawinan, yaitu *nikah rayah*, *nikah rahth*, *nikah istinjad*, dan *nikah wiladah*. *Nikah rayah* adalah perkawinan yang dilakukan oleh perempuan lacur.¹ Dalam literatur fiqih tidak didapati aturan atau regulasi atau pendapat maupun anjuran yang membuat batasan secara tegas usia anak yang boleh dikawinkan. Jika membaca sejarah yang terekam dalam hadis-hadis tentang usia perkawinan, maka akan dapat ditemui fakta bahwa pada masa itu (perempuan) dikawinkan di usia muda atau masih anak-anak bukan menjadi masalah.

Di Indonesia terjadi pergulatan hukum perkawinan sejak jaman pra-kolonial, kolonial, kemerdekaan (orde lama, orde baru). Secara garis besar pada jaman pra-kolonial belum ada lembaga resmi yang secara khusus menangani urusan hukum perkawinan. Hanya saja ada orang-orang yang diserahi untuk mengurus masjid dan perkawinan. Setelah masyarakat muslim mulai teratur dibuatlah lembaga *ahlu al hal wal aqdh* yaitu orang yang dipercayai dalam menyelesaikan permasalahan perkawinan dan segala keputusannya diikuti.

Setelah berjalan beberapa puluh tahun kemudian dibuatlah Undang-undang Tentang perkawinan yang baru, yakni Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, yang senyatanya merupakan perubahan terhadap Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal yang baru hasil perubahan adalah pasal 7 yang mengatur batas minimal dibolehkannya melangsungkan perkawinan bagi laki-laki/perempuan. Semula masing-masing adalah 16 dan 18 tahun diubah menjadi umur paling sedikit 19 tahun baik bagi perempuan atau laki-laki.

Dalam peraturan/Undang-undang tersebut membuka peluang apabila laki-laki dan perempuan atau salah satu di antaranya belum cukup umur untuk melangsungkan akad perkawinan, maka harus mendapat keringanan dari

¹ Al Mawardy, *Kitab Al-Hawi Al-Kabir*, 1st ed. (Beirut: Darul Kutub Ilmiyah, 1994). 6-7

Pengadilan. Apabila yang bersangkutan beragama Islam harus melalui Pengadilan Agama sementara bagi non-muslim mengajukan ke Pengadilan Negeri.

Mengutip hasil penelitian yang dilakukan atas kerjasama UNICEF, PUSKAPA, Badan Pusat Statistik, dan Kementrian PPN/BAPPENAS tahun 2020, menyampaikan bahwa arah pergerakan perkawinan perempuan di bawah umur di Indonesia, baik mereka yang melakukan atau melangsungkan perkawinan pertama kali sebelum mencapai usia 18 tahun ataupun 15 tahun, memberikan informasi adanya penurunan sepanjang rentang waktu tahun 2008 s.d 2018, tetapi penurunannya masih tergolong pelan. Sedangkan perkawinan di antara anak-anak perempuan arah pergerakannya mengalami penurunan, sementara perkawinan di antara anak laki-laki di Indonesia pada kurun waktu 2015 s.d. 2018 menggambarkan arah pergerakan yang cenderung tetap.² Dari sini nampak bahwa negara terus berupaya menekan angka perkawinan anak-anak.

Dalam artikel ini akan dilakukan upaya untuk meneliti urgensi pembatasan usia perkawinan dengan menggunakan perspektif maqashid syariah menurut imam al Syathibi. Dengan demikian diharapkan memperoleh hasil yang dapat dipahami oleh semua kalangan tentang urgensi pembatasan usia perkawinan. Dengan demikian semua pihak ataupun *stake holder* yang terkait tidak akan saling berselisih bahkan berhadapan dengan perbedaan persepsi masing-masing. harapannya tujuan penelitian ini tercapai sehingga penelitian ini akan memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan Hukum Keluarga Islam di Indonesia.

Pembahasan

Fenomena Perkawinan di Bawah Umur

Telah digambarkan dalam latar belakang tersebut bahwa perkawinan usia anak atau di bawah umur adalah fenomena yang mudah ditemui di Indonesia. Bukan berarti itu adalah hal yang wajar melainkan banyak risiko yang di tanggung oleh pasangan muda yang baru kawin. Risiko itu bisa terjadi pada diri sendiri atau pun berdampak pada kehidupan masyarakat sekitar. Terjadinya perkawinan di bawah umur perlu dilakukan kajian mendalam tentang bagaimana sebab yang mendorong baik dari internal dan eksternal pelaku. Bagaimana mitigasi risiko dan pengendaliannya.

Sebab yang melatarbelakangi perkawinan anak di bawah umur berbeda di

² Badan Pusat Statistik, "Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda". Badan Pusat Statistik 6–10 (2020).

tiap daerah berbeda-beda. Setiap perbedaan yang ada lekat dengan kondisi sosio-kultural setempat di mana anak itu tumbuh dan berkembang. Mulai dari kondisi budaya, agama, pendidikan, ekonomi, dan geografis turut berkontribusi dalam memberi pertimbangan bagi masyarakat yang memutuskan untuk melangsungkan akad perkawinan anak-anak di bawah umur.

Di antara daerah di Indonesia diketahui terjadi perkawinan di anak di bawah umur adalah di Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara. Di wilayah kecamatan ini saja tercatat 80 pasangan yang melakukan perkawinan anak di bawah umur dalam rentang waktu 2017 s.d. 2019. Keputusan ini diambil para orang tua karena mereka tidak sanggup membayar biaya pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan mengakibatkan tingginya pengangguran, sehingga anak-anak menggunakan waktunya untuk mendekati lawan jenis dan berlanjut ke jenjang perkawinan.³

Di wilayah Bogor juga lebih kurang demikian meresahkan dengan tingginya perkawinan anak di bawah umur. Bahkan perkawinan yang dilangsungkan memiliki korelasi dengan angka perceraian di wilayah Bogor. Pendorong pokok terjadinya akad perkawinan anak-anak di bawah umur merebaknya gaya pergaulan muda-mudi yang mengarah hubungan seks dengan bebas di luar koridor ikatan perkawinan yang sah. Bila sudah terlanjur, maka mereka akan sesegera melakukan segala upaya agar perkawinan terlaksana bagaimanapun caranya. Di antaranya mereka mengurus dispensasi kawin ke Pengadilan Agama.⁴

Di samping faktor-faktor yang telah disebutkan di atas masih terdapat beberapa faktor lainnya yang mendorong terjadinya perkawinan anak-anak di bawah umur. Faktor tersebut adalah adat budaya yang menganggap orang tua belum sukses dan berhasil manakala masih memiliki anak perempuan yang sudah dianggap gadis –oleh budaya setempat– belum bersuami. Bahkan hal ini bisa dianggap aib bagi keluarga. Sebab lainnya adalah derasnya informasi berupa tayangan-tayangan yang vulgar sehingga mendorong anak di bawah umur untuk segera melakukan hubungan seks.⁵

³ Mukhoyyaroh Yunus, Muh. Idris, "Pernikahan Di Bawah Umur Pada Masyarakat Pesisir Malangke," *Al-Ahwal Al-Syakhsyah, LAI Al-Qolam* 3, no. 2 (2020): 43–51.

⁴ Ani Yumarni and Endeh Suhartini, "Perkawinan Bawah Umur Dan Potensi Perceraian (Studi Kewenangan KUA Wilayah Kota Bogor)," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26, no. 1 (2019): 193–211.

⁵ Edwin Hadiyan, "Membangun Kesadaran Masyarakat Mengenai Tradisi Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Hak Anak," *Jurnal Studi Gender dan Anak* 3, no. 1 (2017): 51–74.

Batas Usia Perkawinan dalam Fiqih

Pada zaman sebelum Nabi Muhammad SAW menyampaikan wahyu-wahyu Allah SWT. Berdasarkan riwayat dari Aisyah RA pada masa itu di tanah Arab dikenal 4 macam bentuk perkawinan, yaitu *nikah rayah*, *nikah rahth*, *nikah istinjad*, dan *nikah wiladah*. *Nikah rayah* adalah perkawinan yang dilakukan oleh perempuan lacur. Perempuan ini menancapkan *rayah* (bendera) di depan rumahnya. Sehingga setiap laki-laki yang melintas di depan rumahnya dapat melakukan hubungan badan hingga perempuan itu hamil. Setelah lahir, maka anak itu akan dinilai kemiripan fisiknya dengan laki-laki yang pernah berhubungan badan. *Nikah rahth* adalah perkawinan yang teknis pelaksanaannya seorang perempuan melakukan hubungan badan dengan beberapa laki-laki (kurang dari 10 orang). Setelah perempuan itu melahirkan anak, maka ia bisa dengan bebas menunjuk siapa yang akan jadi suaminya (ayah dari anak yang dilahirkannya). *Nikah istinjad* (disebut juga *nikah istibdaha*) adalah ketika ada pasangan suami istri yang menginginkan anak dari keturunan terpendang kemudian atas persetujuan suami, si istri melakukan hubungan badan dengan laki-laki lain yang dianggap terpendang hingga hamil dan melahirkan. *Nikah wiladah* adalah perkawinan yang dilakukan pria bujang dan wanita gadis sebagaimana yang dikenal sampai sekarang.⁶

Setelah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu secara berangsur-angsur, maka 4 macam bentuk perkawinan tersebut direduksi hingga tinggal menjadi 1 macam saja, yaitu *Nikah Wiladah*. Dalam al Quran sangat jelas disebut tentang perkawinan dengan menggunakan istilah *nikah*. Sebagaimana disebutkan dalam ayat-ayat berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ ۖ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Maknanya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (an Nur: 32)

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَؤْمِنَةً حَيْرَ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ
وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ حَيْرَ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ

⁶ Mawardy, *Kitab Al-Hawi Al-Kabir*: 6-7

أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Maknanya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”

Selain ayat-ayat al Quran yang bertutur tentang perkawinan, di dalam riwayat atau hadis Nabi juga banyak membicarakan tentang perkawinan. Salah satu di antaranya adalah hadis yang riwayatkan oleh imam Bukhari⁷:

حَدَّثَنِي فَزْرَةُ بْنُ أَبِي الْمُعَرِّاءِ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: «تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَنَزَلْنَا فِي بَيْتِ الْحَارِثِ بْنِ خَزْرَجٍ، فَوَعِكَتُ فَتَمَرَّقَ شَعْرِي، فَوَفَى جُمَيْمَةً فَأَتَنِي أُمِّي أُمُّ رُومَانَ، وَإِنِّي لَفِي أَرْجُوْحَةٍ، وَمَعِيَ صَوَاحِبُ لِي، فَصَرَحْتُ بِي فَأَتَيْتُهَا، لَا أَدْرِي مَا تُرِيدُ بِي فَأَخَذَتْ بِيْدِي حَتَّى أَوْقَفْتَنِي عَلَى بَابِ الدَّارِ، وَإِنِّي لَأُتْهِجُ حَتَّى سَكَنَ بَعْضُ نَفْسِي، ثُمَّ أَخَذَتْ شَيْئًا مِنْ مَاءٍ فَمَسَحَتْ بِهِ وَجْهِي وَرَأْسِي، ثُمَّ أَدْخَلَتْنِي الدَّارَ، فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي الْبَيْتِ، فَقُلْنَ عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَاتِ، وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ، فَأَسْلَمْتَنِي إِلَيْهِنَّ، فَأَصْلَحْنَ مِنْ شَأْنِي، فَلَمْ يُرْعِنِي إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحَى، فَأَسْلَمْتَنِي إِلَيْهِ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ»

Maknanya: “Menceritakan kepada kami farwah bin Abi al-Migrai Menceritakan kepada kami Ali bin Mas-har dari Hisyam dari ayahnya dari Aisyah berkata Rasulullah saw menikahiku sewaktu aku berusia enam tahun, dan diboyong kepada beliau saat berumur Sembilan tahun, Aisyah meneruskan: sesampainya kami di Madinah, aku terserang demam selama satu bulan,

⁷ Muhammad bin Ismail Abu ‘Abd Allah Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, Dar Al-Fikr, 1st ed. (Beirut: Darul Ibnu Kathir, 2002). 954

sampai rambutku sempurna mencapai telinga Ummu Rumah kemudian mendatangi. Saat itu aku sedang bermain urjubah bersama teman-temanku. Ibuku memanggilku, hingga akupun mendatangnya. Aku tidak tahu apa yang dikehendaki ibuku atas diriku. Ia kemudian meraih tanganku, (membawaku) lalu menghentikanku di pintu (rumah). Aku berkata, A, a, sampai nafasku terputus, Ibuku kemudian memasukkanku ke dalam rumah. Ternyata disana sudah ada beberapa wanita Anshar. Mereka berkata, Semoga (engkau) memperoleh kebaikan dan keberkahan. Semoga (engkau) memperoleh bagian yang baik. Ibuku menyerahkan aku kepada mereka. Mereka kemudian mengeramasi kepalaku dan mendandaniku. Tidak ada yang mengejutkanku kecuali saat Rasulullah (datang) pada waktu dhuha dan hari itu saya berusia sembilan tahun.”

Dalam hadis tersebut menceritakan bahwa ada fakta bahwa Nabi Muhammad SAW melakukan perkawinan dengan Aisyah RA saat beliau berusia 6 tahun. Akan tetapi, nabi Muhammad SAW tidak langsung tinggal serumah dengan Aisyah RA hingga beliau berusia 9 tahun.

Rukun-rukun yang harus dipenuhi ketika dilangsungkannya akad perkawinan Islam adalah harus ada bakal calon pengantin laki-laki dan perempuan, wali *nikah* dari pihak perempuan, mahar, saksi, dan akad. Khusus untuk syarat yang melekat bagi perempuan adalah⁸:

1. Harus benar-benar berjenis kelamin perempuan bukan yang lain. Laki-laki tidak sah mengawini laki-laki lainnya atau banci *Musykil* yang tidak jelas kelaminnya, laki-laki atau perempuan. Walaupun sesama laki-laki yang dimaksud ini saling mencintai dan bersepakat, tetap tidak akad sah dan mengikat akad *nikahnya*.
2. Perempuan yang hendak dikawinkan harus tidak memiliki hubungan *mahram* dengan laki-laki yang akan dikawini. Baik hubungan tersebut adalah hubungan nasab dengan batasan yang sudah ditentukan, ataupun ada hubungan *radhoah* (sesusuan).

Dalam literatur fiqh tidak didapati aturan atau regulasi atau pendapat maupun anjuran yang membuat batasan usia perempuan yang boleh dikawinkan. Jika membaca sejarah yang terekam dalam hadis-hadis tentang usia perkawinan bagi perempuan, maka akan dapat ditemui fakta bahwa pada masa itu perempuan dikawinkan di usia muda atau anak-anak bukan menjadi masalah.

⁸ Wahbah Zuhaili, “*Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu* Juz VII” (Dimasyq: Darul Fikr, 1985). 49

Wali *Nikah* dan Kewenangannya

Nikah atau disebut perkawinan –sebutan dalam Undang-undang perkawinan– merupakan perbuatan hukum yang dipandang berbeda-beda oleh ulama. Sebagian ulama ada yang menganggapnya bukan termasuk kategori ibadah dengan alasan sahnya perkawinan orang kafir. Ada pula yang berpendapat perkawinan adalah salah satu bentuk ibadah karena ia adalah mandat yang ada di dalam ayat-ayat al Quran dan juga dicontohkan oleh nabi Muhammad SAW.⁹

Telah menjadi pengetahuan umum di Indonesia tentang ketentuan perkawinan yang akan dilakukan perlu keberadaan wali agar perkawinannya menjadi sah menurut hukum. Ketentuan tentang wali ini juga memiliki beberapa bentuk yang sebagaimana terdapat dalam mazhab-mazhab populer di dunia dan juga di Indonesia, yaitu mazhab Syafii, Maliki, Hanbali, dan Hanafi. Akan tetapi, secara umum dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yakni kelompok (mazhab Syafii, Maliki, Hanbali) yang mewajibkan wali dan kelompok yang tidak mewajibkan wali (mazhab Hanafi).¹⁰

Perempuan yang akan melangsungkan perkawinan, maka walinya harus menanyakan persetujuannya apakah ia mau dikawinkan atau menolaknya. Apabila perempuan ini sudah janda, maka wajib untuk dimintai persetujuannya. Akan tetapi, apabila masih gadis (belum pernah kawin), maka ada yang berpendapat tidak perlu dimintai persetujuan. Lain halnya dengan pendapat imam Hanifah bahwa persetujuan perempuan adalah mutlak diperlukan, baik perempuan itu janda atau masih gadis. Tanpa persetujuannya, wali tidak boleh mengawinkannya.¹¹

Adapun anak-anak baik laki-laki atau perempuan tidak diperlukan persetujuannya. Namun, hal inipun terdapat beberapa pendapat di kalangan ulama. Ibnu Syubramah, Abu Bakar al Asham, dan Usma al Butti, berpendapat bahwa anak kecil tidak boleh kawin atau dikawinkan hingga mencapai umur baligh. Mereka berargumen dengan surat an-Nisa: 6

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ

Maknanya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin.”

Akan tetapi, jumhur ulama (mazhab Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hanbali) tidak mensyaratkan akal dan *baligh* dalam sahnya perkawinan. Bahkan mereka

⁹ *Mausuah al Fiqhiyah*, juz 41, 217.

¹⁰ Wahbah, *al fiqhul Islam wa adillatuhu*, juz 7, 187.

¹¹ al-Sarakhsi, *Kitab al Mabsuth*, juz 5, 2.

berpendapat sah perkawinan anak laki-laki yang masih di bawah umur (kecil) dan orang gila.¹²

Perbedaan para ulama mazhab tersebut di atas menitik beratkan akal sebagai objek yang tidak dijadikan syarat perkawinan. Menurut mazhab Hanafi, seorang wali boleh mengawinkan laki-laki atau perempuan yang gila maupun idiot, baik mereka masih kecil atau sudah besar/dewasa, baik masih perawan/perjaka atau janda/duda. Demikian juga dalam Mazhab Maliki, tetapi jika gila kadang-kadang sembuh, maka ditunggu sampai sadar betul untuk meminta izinnya dan tidak dipaksa. Sementara mazhab Syafii berpendapat bahwa orang yang gila baik ia besar atau masih kecil hanya boleh dikawinkan jika memang ia memiliki hajat dalam perkawinan tersebut. Adapun yang bertindak sebagai wali adalah Ayah atau Kakek saja. Apabila keduanya tidak ada, maka pemerintahlah yang mengambil alih fungsi tersebut.

Ayah dan Kakek dapat mengawinkan perempuan gila baik ia masih kecil atau sudah besar apabila mereka (ayah/kakek) melihat ada kemaslahatan dalam hal itu. Apabila jika anak tersebut belum dikawinkan hingga dewasa, maka pemerintah dapat mengawinkannya jika dinilai ada kepentingan bagi si anak. Mazhab Hanbali berpendapat jika anak yang gila memiliki ketertarikan terhadap laki-laki yang diketahui melalui ucapannya atau perilakunya, maka wali boleh mengawinkannya dengan tujuan agar tidak terjadi kerusakan pada diri anak.¹³

Selain wilayah kewenangan wali untuk mengawinkan orang yang tidak sempurna akalnya baik anak-anak atau besar, terdapat juga perbedaan pendapat tentang kewenangan mengawinkan perempuan yang masih dalam kondisi gadis dan perempuan yang dalam status sudah janda. Menurut mazhab Hanafi anak perempuan yang sudah baligh dan sempurna akalnya (tidak gila/idiot), maka ia telah memiliki hak untuk mengatur kehidupannya di bidang harta dan perkawinan. Ia tidak bisa lagi dikawinkan secara paksa (*ijbar*) baik ia masih perawan ataupun janda. Sedangkan menurut mazhab Syafii, hanya perempuan janda dan berakal (tidak gila/idiot) yang tidak boleh dikawinkan secara *ijbar*.¹⁴

Kewenangan Wali dalam Undang-undang Perkawinan

Dalam pasal 6 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia tidak ada ketentuan dengan rinci tentang kewenangan wali. Pada

¹² Wahbah, *Al Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*, juz 7, 179.

¹³ Ibid., 184.

¹⁴ Ibid., 189-190.

pasal tersebut tercantum pokok-pokok bahwa perkawinan bisa dilaksanakan jika mendapat persetujuan mempelai dan orang tua atau wali. Apabila mempelai dan wali sama-sama sepakat, tetapi mempelai masih belum cukup umur, maka wali dapat meminta dispensasi kawin kepada Pengadilan. Hal yang senada juga tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 19 s.d. pasal 23. Peraturan-peraturan tersebut memberikan kewenangan kepada wali yang berhak untuk mengawinkan anak sepanjang syarat umur minimal terpenuhi.

Negara memberikan kewenangan kepada Pengadilan untuk memberikan dispensasi kepada anak (di bawah umur) laki-laki atau ayah/wali anak (di bawah umur) perempuan hendak kawin, tetapi umurnya tidak mencukupi batas minimal. Ada 3 fase batas umur dibolehkannya perkawinan dilangsungkan di Indonesia. Fase pertama, sebelum diberlakukannya Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Saat itu regulasi perkawinan diatur dengan Undang-undang nomor 22 tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, serta Undang-undang nomor 32 tahun 1954.¹⁵ Kedua Undang-undang ini mengatur tata cara pencatatan Perkawinan, Talak, dan Rujuk saja serta pemberlakuannya di Jawa-Madura dan Luar Jawa-Madura. Di dalamnya sama sekali tidak mengatur tentang batas usia dibolehkannya kawin. Fase kedua, setelah diberlakukannya Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Di dalam Undang-undang ini mengatur lebih banyak tentang perkawinan bukan saja bagi orang Islam melainkan bagi non-Islam. Melalui peraturan ini baru dimunculkan dan diberlakukan ketentuan pembatasan umur minimal untuk dilakukannya perkawinan, yaitu 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Jika kurang dari batas itu, maka wajib mendapat penetapan Dispensasi dari Pengadilan terlebih dahulu. Fase ketiga, setelah diberlakukannya Undang-undang nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam Undang-undang ini ditentukan bahwa umur dibolehkannya kawin bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Dibuatnya Undang-undang ini adalah dalam rangka mentaati isi putusan Mahkamah Konsitusi nomor 22/PUU-XV/2017, dalam putusan ini pembuat Undang-undang diberi tempo 3 tahun untuk melakukan perubahan terhadap Undang-undang nomor 1 tahun 1974, khususnya tentang batas usia 16 tahun bagi perempuan.¹⁶

Pedoman Bagi Hakim

Tuntutan sebagai Hakim adalah mampu mengenal, mendalami, dan

¹⁵ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Jo. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946

¹⁶ Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 22/PUU-XV/2017

memahami nilai-nilai dan aturan-aturan yang hidup dan berlaku di tengah masyarakat. Spirit ini termaktub dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal ini tidak lain bertujuan dengan kekuasaan kehakiman dapat menghadirkan fungsi hukum dan tegaknya keadilan bagi masyarakat.

Hakim adalah organ negara yang akan disorot oleh masyarakat karena ialah 'benteng terakhir' tegaknya keadilan. Para pencari keadilan sangat mengharapkan hal ini benar-benar terwujud. Hakim yang didambakan adalah hakim yang memiliki profesionalisme dan integritas yang baik antara keilmuan dan akhlak.

Dalam menyelesaikan perkara-perkara permohonan Dispensasi Kawin Hakim tetap dituntut mandiri, bebas dari tekanan, dan imparisial. Terdapat 10 karakter yang harus tertanam dalam diri Hakim sebagaimana tertulis dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, yaitu: "Berperilaku Adil, Berperilaku Jujur, Berperilaku Arif dan Bijaksana, Bersikap Mandiri, Berintegritas Tinggi, Bertanggung Jawab, Menjunjung Tinggi Harga Diri, Berdisiplin Tinggi, Berperilaku Rendah Hati, Bersikap Profesional."¹⁷

Selain pedoman umum sebagaimana disebut di atas, ada pedoman khusus yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI), yakni Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin. PERMA ini menjadi pedoman bagi yang berkepentingan dalam Dispensasi Kawin, terutama bagi para Hakim. Dengan adanya PERMA ini diharapkan ada *standart* baku yang dipedomani baik bagi peradilan umum ataupun peradilan agama. Dengan adanya pedoman baku ini, masyarakat akan bisa mengukur dan menilai secara mandiri bagaimana posisi dan kedudukannya dalam perkara Dispensasi Kawin. Penetapan Dispensasi Kawin akan minim disparitas pertimbangan karena dalam PERMA ini sangat detil mengatur apa saja yang harus dipertimbangkan dalam menangani perkara Dispensasi Kawin. Peraturan ini merupakan terbosan hukum yang dibuat oleh Mahkamah Agung RI setelah sekian lama Hakim menangani perkara ini tanpa panduan khusus.

PERMA Nomor 5 tahun 2019 berisikan 7 bab dan 21 Pasal. Secara umum dalam PERMA ini dapat dikelompokkan 3 tema pokok, yaitu tentang asas, administrasi, dan teknis pemeriksaan perkara Permohonan Dispensasi Kawin. Sebelum diterbitkan PERMA ini Hakim Pengadilan Agama

¹⁷ KMA/104A/SK/XII/2006 tanggal 22 Desember 2006, tentang Pedoman Perilaku Hakim dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 215/KMA/SK/XII/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim.

berpedoman pada asas-asas yang lebih universal, seperti asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dengan adanya PERMA ini bukan berarti asas-asas yang biasa dipakai diabaikan, tetapi lebih menguatkan dan memperjelas setiap langkah yang ditempuh oleh Hakim pemeriksa.

Asas-asas yang ada dalam PERMA nomor 5 tahun 2019 pasal 2, adalah: “Kepentingan terbaik bagi anak, Hak hidup dan tumbuh kembang anak, Penghargaan atas pendapat anak, Penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non-diskriminasi, Kesetaraan gender, Persamaan di depan hukum, Keadilan, Kemanfaatan, Kepastian hukum.”¹⁸

Adapun untuk bagian ketentuan administrasi tidak menyulitkan dan padat dipahami masyarakat karena hanya menyertakan fotokopi dokumen-dokumen yang sudah dimiliki. Kemudian bagian tentang teknis mengadili terdapat ketentuan yang cukup progresif, yaitu tertuang dalam pasal 10 sampai dengan pasal 18. Ketentuan pemeriksaan dalam persidangan yang harus dilakukan oleh Hakim adalah:

- a. Memberi kesempatan untuk menghadirkan anak yang hendak dikawinkan dan orang tua/wali yang bersangkutan. Apabila tidak hadir, maka perkara permohonan Dispensasi Kawin yang sudah diajukan tidak dapat diterima dalam persidangan
- b. Menggunakan tata-bahasa yang mudah dipahami dan tidak mengenakan atribut toga sidang
- c. Memberikan pemahaman kepada calon pasangan suami/istri dan orang tua/wali tentang risiko pendidikan yang terhambat, kesehatan reproduksi yang belum siap, dan potensi kekerasan-perselisihan dalam rumah tangga
- d. Mendengarkan keterangan dari orang tua/wali dan calon pengantin. Apabila upaya ini tidak dijalankan, maka penetapan tersebut akan batal demi hukum
- e. Hakim dapat meminta rekomendasi dan masukan dari tenaga ahli yang berkompeten menangani kebutuhan anak, seperti psikolog, tenaga kesehatan, dan lain sebagainya
- f. Hakim harus mempertimbangkan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum terkait dan kearifan lokal serta esensi keadilan yang hidup di khalayak masyarakat

Dari uraian tentang 3 tema pokok dalam PERMA nomor 5 tahun 2019 tampak upaya serius dari Mahkamah Agung RI untuk memberikan kemaslahatan dalam setiap penetapan yang dijatuhkan oleh Hakim. Kewenangan Mahkamah Agung RI menerbitkan PERMA (Peraturan

¹⁸ PERMA nomor 5 tahun 2019 pasal 2

Mahkamah Agung) yang merupakan delegasi dari badan legislatif. Delegasi kewenangan ini ditujukan agar dapat mengisi hukum yang kosong yang tidak senantiasa dapat dicukupi oleh Undang-undang. Oleh karenanya PERMA yang diterbitkan memberikan ruang gerak tambahan bagi hakim dan pihak-pihak yang terkait agar kebutuhan akan hukum dapat segera terpenuhi.¹⁹

Menakar Pembatasan Usia Minimum Perkawinan Menggunakan Teori Maqasid Syariah Al Syatibi

Al-Syatibi adalah ulama kesekian dari rentetan ulama yang membahas tentang Maqasyid Syariah. Secara kronologis dapat diuraikan sebagai berikut²⁰:

1. Imam al Haramayn al Juwayni (wafat tahun 478 H)

Imam Juwayni memiliki nama lengkap Abu al Maali Abdul Malik bin Abdillah bin Yusuf al Juwayni. Beliau secara jelas menyebut bahwa seseorang hanya mampu menetapkan hukum apabila ia telah mampu memahami maksud dari ditetapkannya syariat. Imam Juwayni lah ulama yang meletakkan pondasi maqashid syariah, yakni dhoruriyat, Hajiyyat, dan tahsiniyat.

2. Imam al Ghazali (wafat tahun 505 H)

Imam al Ghazali adalah murid dari Imam al Juwayni. Beliau meneruskan pemikiran gurunya. Beliau menyatakan bahwa penetapan hukum yang terkait muamalah harus memperhatikan illat yang selaras dengan maqashid syariah. Selain itu beliau juga menyatakan bahwa kemaslahatan selalu berorientasi dalam 5 hal, yaitu: "*memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta*". Setiap produk hukum yang mengakomodir 5 prinsip tersebut adalah maslahat, sedangkan yang tidak mengakomodir kelimanya adalah mafsadah yang harus dihindari bahkan ditolak.

3. Imam al Izzuddin bin Abdusalaam (wafat tahun 660 H)

Menurut Beliau, kemaslahatan harus dieratkan dengan 3 rangkaian skala prioritas, yakni *dhoruriyyat*, *hajiyyat*, dan *takmilīyat/tatimmat*. Selain itu beliau menyampaikan bahwa setiap produk ketentuan hukum harus memuat dua jenis kemaslahatan, maslahat dunia dan akhirat.

4. Imam Al-Syatibi (wafat tahun 790 H)

Setelah ketiga ulama besar di atas, maka muncullah nama imam al-Syatibi, pada abad ke delapan hijriyah dengan karya monumentalnya al-

¹⁹ Agus Satory Hotma Pardomuan Sibuea, "Problematika Kedudukan Dan Pengujian Peraturan Mahkamah Agung Secara Materiil Sebagai Peraturan Perundang-Undangan," *PALAR (Pakuan Law Review)* 06, no. 1 (2020): 1–27.

²⁰ Musolli Musolli, "Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer," *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2018): 60–81.

Muwafaqat fi Usul al-Syariah yang menjadi pertanda awal perkembangan orientasi kajian mengenai ushul fiqh, utamanya mengenai konsep Maqasid Syariah.”

Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa bin Muhammad al-Lakhami al-Garnati al-Syathibi atau yang biasa dikenal dengan nama imam al-Syatibi²¹ adalah merupakan seorang ulama Malikiyah (pengikut madzhab Imam Malik) ahli ushul fiqh, Bahasa Arab, tafsir dan hadis pada masanya. Beliau wafat di Granada yang merupakan salah satu kota di Spanyol pada tanggal 8 Syaban 790 H/1388 M di Granada, sedangkan untuk tempat dan tahun kelahirannya sampai saat ini sejarawan masih berdebat mengenai hal tersebut. Sebagian mengatakan al-Syathibi lahir pada tahun 730H dan Sebagian lain pada tahun 720H.”

Sampai saat ini, latar belakang keluarga imam al-Syatibi belum diketahui. Akan tetapi jika melihat gelar nama al-Syatibi yang ada pada namanya adalah merupakan penisbatan dari tempat kelahiran nenek moyangnya, yaitu Xativa (Syatibat, bahasa Arab), sebuah wilayah terletak sebelah timur Andalucia.²² Akan tetapi, kemungkinan besar imam al-Syatibi tidak lahir di Xativa karena puluhan tahun sebelum kelahirannya kota Xativa berada dalam kekuasaan raja Uraqun Spanyol pada 1239 M, sehingga pada ahli sejarah memberikan kesimpulan bahwa beliau lahir dan tumbuh besar di Granada.”

Catatan mengenai pengembaraan imam al-Syathibi dalam mencari ilmu, tidak ada keterangan yang pasti mengenai hal tersebut sebagaimana tanggal dan tempat kelahiran beliau.²³ Akan tetapi, para ahli sejarawan berpendapat bahwa imam al-Syathibi sekalipun tidak pernah keluar dari kota Granada walaupun untuk sekedar menunaikan haji.”Imam Syatibi tumbuh dan mendapatkan edukasinya di Granada yang kala itu adalah ibu kota dari kerajaan Nashr, Spanyol. Ketika Syatibi masih remaja, di sana diperintah oleh Raja Muhammad V al Ghany Billah.

Kondisi tersebut sangat mendukung bagi Syatibi untuk mengembangkan potensi akademisnya. Ia dengan sungguh-sungguh belajar tentang metodologi dan hakikat (*wasail dan maqashid*). Imam Syatibi belajar bahasa Arab dari Abu Abdillah Muhammad ibn Fakhkarn Al-Biri, Abu Qasim Muhammad ibn Ahmad Al-Syatibi, dan Abu Ja'far Ahmad Al-Syaqwari. Kemudian ia mempelajari dan mendalami ilmu hadits dari Abu Qasim ibn Bina dan

²¹ Fathur Rohman, “Maqasid Syariah dalam Perspektif al-Syatibi,” E-Jurnal: ISTIDAL Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 4 No. 2 ISSN: 2356-0150 (Desember 2017), 164

²² Ahmad Raisuni, *Nazariyyat al-Maqasib Inda al-Syatibi*, (Herndon-Virginia: The International Institute of Islamic Thought, 1995), 109

²³ Ibid, 109

Syamsuddin Al-Tilimsani. Sementara untuk ilmu filsafat atau kalam, ia belajar dari Abu Ali Mansur Al-Zawawi. Adapun ilmu tentang ushul fiqh, ia mempelajari dari Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad Al-Miqarri dan Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad Al-Syarif Al-Tilimsani. Termasuk ilmu sastra/bahasa dari Abu Bakar Al-Qarsyi Al-Hasyimi.²⁴

Sebelum Al-Syatibi menerangkan apa perihak *maqashid al-syari'ah*, imam al-Syatibi memberikan penjelasan pendahuluan perihal *ta'lil al-syari'ah* (sebab/alasan hukum). Menurutnya syariat (Allah swt.) menetapkan suatu hukum semata-mata untuk kebaikan manusia sebagai hamba-Nya ketika hidup di dunia maupun setelah di kehidupan akhirat nanti. Imam al-Syatibi juga menuturkan bahwa penelitian hukum yang telah dilakukannya dapat membuktikan ditetapkannya hukum oleh syariat adalah demi kebaikan hamba-Nya. Proses penentuan alasan (*illat*) hukum ini, diterapkan terhadap semua produk hukum secara rinci.

Menurut al-Syatibi bahwa muatan maqasid al-syari'ah atau tujuan hukum adalah demi kebaikan ummat manusia. Upaya memahami maqasid al-syariah menempati bagian yang sangat besar dalam karya al-Syatibi. Teori Maqasid al-syariah senantiasa mewarnai corak pembahasannya di dalam keempat jilid buku karyanya (*al-Muwafaqat*). Imam Al-Syatibi menekankan bahwa kandungan hukum seluruh ayat-ayat al Quran terdapat maksud dan tujuan dan *Syari'* untuk memberikan kebaikan (maslahat) kepada manusia.²⁵

Apabila unsur-unsur yang meliputi ”penjagaan Agama, jiwa, keturunan, akal dan harta”, dipelihara dan diwujudkan, maka kemaslahatan yang diharapkan akan bisa direalisasikan.²⁶ Dalam usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok itu al-Syatibi membaginya menjadi 3 bagian. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa imam Al-Syatibi mengklasifikasikan kebutuhan dasar menjadi 3 tingkatan, yaitu *dhoriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniiyyat*. Mengenai penjagaan Agama, jiwa, keturunan, akal dan harta, digolongkan menjadi bagian dari *dhoriyyat*.

Kelima kategori tersebut bersifat kumulatif bukan alternatif, sehingga kelima hal tersebut harus ada agar kebutuhan *dhoriyyat* bisa terpenuhi. Tanpa adanya kehidupan (keselamatan nyawa), akal yang sehat, keturunan yang terjaga dari hal buruk menurut *Syari'*, dan kecukupan harta, maka akan sulit

²⁴ Melis, “Pemikiran Tokoh Ekonomi Muslim: Imam Al-Syatibi,” *Islamic Banking* 2, no. 1 (2016): 51–62.

²⁵ Al-Muwafaqat I, 6-7

²⁶ Lima unsur pokok di atas, dalam literatur-literatur hukum Islam lebih dikenal dengan Ushul al-Khamsah dan susunannya adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

memenuhi kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh *Syari'*, dalam hal ini adalah melaksanakan kewajiban-kewajiban keagamaan.

Adapun kebutuhan *Hajiyat* adalah mempermudah terlaksananya kebutuhan *Dhururiyyat*. Sebagai gambaran implementasi akan hal ini adalah keringanan atau *rukhsah* yang diberikan dalam pelaksanaan shalat dan puasa. Bagi yang tidak mampu, maka ada mekanisme lain sebagai penggugur kewajiban. Dengan demikian seorang *mukallaf* akan dapat melaksanakan segala kewajiban dengan nyaman.

Sedangkan kebutuhan *Tahsiniyat* merupakan sesuatu yang tidak harus dipenuhi. Pada tingkatan ini yang ditekankan lebih kepada nilai estetika kehidupan. Misalnya berhias secara layak ketika pergi ke Masjid, memperbanyak ibadah sunnah, dan tidak boros dalam bermuamalah.²⁷

Dalam upaya memahami pergerakan dan pergeseran dunia hukum Islam, pengategorian yang dibuat yang dilakukan oleh al-Syatibi menjadi 3 bentuk maqashid bisa juga digolongkan menjadi 2 bagian. Beliau memang tidak secara jelas menyebut 2 pembagian ini. Akan tetapi, dari arah pemikirannya yang bermaksud mengedepankan kemaslahatan bagi subjek hukum. Arah pemikiran atau orientasinya pendapat hukumnya adalah selalu mengarah kepada kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat, *Al-Mashalih al-Dunyawiyah* (tujuan kebaikan duniawi) dan *Al-Mashalih al-Ukhrawiyah* (tujuan kebaikan ukhrowiy).

Pembagian maqasid ke dalam maqasid yang berorientasi kebaikan dunia dan kebaikan akhirat dimaksudkan oleh beliau, imam al-Syatibi, sebagai penegas bahwa Islam adalah agama yang kompleks, agama yang mengatur seluruh lini kehidupan manusia. Di samping itu untuk sebagai penanda bagi pemikir hukum (*mujtahid*) agar tidak menyentuh dan mengutak-atik wilayah yang sudah baku dan hanya menyentuh wilayah-wilayah yang dapat “dijithadi” demi menemukan hukum baru sesuai dengan kebutuhan manusia di zamannya sendiri.²⁸

Dalam fiqih munakahat yang telah disinggung pada bagian awal, menjelaskan kedudukan hukum asal perkawinan dalam Islam. Ada sebagian ulama Syafiiyah yang berpendapat perkawinan bukanlah ibadah, tetapi lebih banyak ulama yang berpendapat perkawinan adalah juga merupakan ibadah. Pada asalnya perkawinan dalam Islam adalah boleh (mubah), kemudian akan

²⁷ Hamsah Hudaf Agung Kurniawan, “Konsep Maqasid Syari’ah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab *Al-Muwafaqat*” *al Mabsut* 15, no. 1 (2021): 29–38.

²⁸ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syari’ah Menurut al-Syatibi*, 73

berubah-ubah sesuai dengan kondisi, keadaan, konteks yang meliputi subjek Hukum.

Dalam Islam ada dikenal 5 macam status hukum, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram.²⁹ Demikian pula perkawinan akan dapat berubah menjadi 5 status hukum. Perkawinan menjadi wajib manakala si pelaku/subjek hukum memiliki keinginan berhubungan seks dan ia mampu memberi nafkah dan bertanggung jawab atas akibat hukum dari sebuah perkawinan. Apabila ia tidak dapat menyalurkan kebutuhan biologisnya, kemudian ia khawatir akan terjadi perzinahan, maka bagi orang tersebut berada di posisi 'wajib' untuk melangsungkan perkawinan.

Perkawinan dapat menjadi sunnah apabila subjek hukum memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab akan konsekuensi hukum dan lain sebagainya pasca perkawinan, tetapi ia masih merasa secara terukur bahwa ia mampu menahan diri dari perbuatan zina ataupun yang mendekati zina (hal-hal seduktif). Oleh karena itu, para ulama berpendapat bagi orang yang dalam keadaan seperti ini dianjurkan untuk melangsungkan perkawinan.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ
الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ
لَهُ وَجَاءٌ

Maknanya: “Dari Abdilllah berkata: Rasulullah Saw bersabda kepada kami, hai para pemuda barang siapa diri kalian mampu untuk menikah, maka nikahlah, sesungguhnya nikah itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan, sedang bagi yang belum mempunyai kemampuan menikah agar menunaikan ibadah puasa, sebab puasa dapat menjadi penawar nafsu sahwat.”

Perkawinan dapat dihukumi sebagai perbuatan yang mubah manakala dilakukan dengan tidak didorong oleh kekhawatiran berbuat keji dan tidak pula karena didorong oleh keinginan yang kuat. Inilah yang berlaku secara umum di tengah masyarakat, sehingga para ulama bersepakat menghukumi mubah akan perkawinan yang seperti ini. Hukum mubah ini juga diperuntukkan bagi subjek hukum yang dalam kondisi di ambang keraguan apakah ia akan melangsungkan perkawinan atau tidak. Misalnya punya keinginan, tetapi ia ragu akan kemampuan tanggung jawabnya. Demikian juga ia sudah mempunyai potensi

²⁹ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, ed. Wildan, 2nd ed. (Bantul: Ladang Kata, 2020). 52-57

kemampuan, tetapi ia belum memiliki dorongan yang kuat untuk melakukan perkawinan.

Kondisi hukum selanjutnya adalah makruh. Perkawinan dapat menjadi makruh manakala subjek hukumnya memiliki kemampuan di bawah rata-rata kebutuhan pasangannya. Misalnya dari penghasilan yang pas-pasan atau di bawah standar minimum hidup pasangannya. Bisa juga dari kemampuan biologis yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasangannya. Jika subjek hukum dalam kondisi seperti itu kemudian dia tetap melangsungkan perkawinan akan membuka peluang lebih besar akan terjadinya hal-hal yang kurang disukai oleh pasangannya.

Kondisi hukum yang kelima adalah Haram. Perkawinan akan menjadi haram dilakukan apabila si pelaku/subjek hukum tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan kewajibannya. Ini tidak hanya dibebankan kepada salah satu jenis kelamin saja, tetapi kepada laki-laki dan perempuan yang akan melakukan perkawinan. Misalnya laki-laki tidak mempunyai sumber penghasilan sehingga sama sekali tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar kehidupan, yaitu penyediaan tempat tinggal, pakaian penutup aurat, dan makanan yang sehat dan wajar demi menopang kehidupan. Bisa juga salah satu baik laki-laki atau perempuan tidak bisa sama sekali melakukan hubungan seks yang tentunya akan menghambat esensi perkawinan itu sendiri. Apabila dipaksakan perkawinan dengan kondisi seperti ini, maka yang terjadi adalah keteraniayaan salah satu pasangan, atau bahkan keduanya hidup dalam kesukaran dan penderitaan.

Dalam penentuan lima macam hukum akan perkawinan sebagaimana terurai di atas nampak sekali akan dominasi logika maqashid syariah dalam menentukan maslahat atau kebaikan yang hendak di capai dalam ikatan perkawinan. Kelima kondisi hukum tersebut bisa diuraikan dengan pendekatan *risk-reward* sebagaimana yang sering digunakan dalam manajemen risiko dalam ilmu modern. Apabila *risk-reward* adalah 2:0, akan menjadi Haram. Apabila *risk-reward* adalah 1:0, akan menjadi makruh. Apabila *risk-reward* 1:1, akan menjadi mubah. Apabila *risk-reward* 0:1 akan menjadi sunnah. Apabila *risk-reward* 0:2 akan menjadi wajib.

Dalam pembahasan maqashid syariah imam Al-Syatibi senantiasa berupaya sekuat tenaga untuk mengurai dan merinci satu persatu komponen terkait pembentukan hukum dikaitkan dengan kepentingan duniawi dan ukhrowi. Seberapa besar hasil duniawi dan ukhrowi yang hendak dicapai oleh pelaku (subjek hukum). Kemudian dilanjutkan dengan konstantir dan kualifisir unsur-

unsur yang dapat memenuhi lima kriteria penjagaan (*al hifdz*), *hifdz al diin*, *hifdz al nafs*, *hifdz al aql*, *hifdz al maal*, dan *hifdz al nasl*.

Dalam ketentuan PERMA nomor 5 tahun 2019 terdapat asas-asas yang harus dipatuhi oleh hakim pemeriksa perkara, yaitu:

- a. Kepentingan terbaik bagi anak
- b. Hak hidup dan tumbuh kembang anak
- c. Penghargaan atas pendapat anak
- d. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia
- e. Non-diskriminasi
- f. Kesetaraan gender
- g. Persamaan di depan hukum
- h. Keadilan
- i. Kemanfaatan
- j. Kepastian hukum

Asas pertama tentang “kepentingan terbaik bagi anak”, Hakim harus bisa mengidentifikasi kepentingan apa saja yang dibutuhkan oleh si anak, bukan kepentingan yang diinginkan. Kerap kali terjadi dalam Permohonan tertulis yang diajukan, belum dibedakan antara kepentingan dan keinginan. Sehingga sering kali wali/orang tua mengedepankan keinginan anak walau harus mengorbankan kepentingan. Asas kedua tentang “Hak hidup dan tumbuh kembang anak” ditujukan agar Hakim betul-betul menakar apakah perkawinan yang nantinya akan dilakukan tidak menghalangi hak hidup anak dan menghambat tumbuh kembang anak. Bisa jadi setelah perkawinan si anak justru tidak sempat mencukupi kebutuhan nutrisi tubuhnya karena sibuk mengurus keluarga barunya.

Asas yang ketiga “Penghargaan atas pendapat anak” merupakan asas yang harus dipahami dan dilakukan tidak saja oleh Hakim, tetapi juga oleh orang tua/wali si anak. Oleh karenanya, di pasal-pasal selanjutnya dalam PERMA nomor 5 tahun 2019 harus dihadirkan anak yang hendak dikawinkan dan orang tua/wali yang bersangkutan untuk didengar pendapat dan keterangan-keterangan terkait. Apabila tidak hadir, maka perkara permohonan Dispensasi Kawin yang sudah diajukan tidak dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut. Dalam realitas di persidangan kadang ditemukan perbedaan pendapat yang bertolak belakang antara anak dan wali/orang tua. Si anak ingin melanjutkan sekolah yang lebih tinggi, sementara orang tua/wali ingin segera anaknya melangsungkan perkawinan.

Asas keempat adalah “Penghargaan atas harkat dan martabat manusia” mengharuskan Hakim lebih lembut dalam melakukan pemeriksaan perkara

dispensasi perkawinan. Dalam pasal lainnya di PERMA nomor 5 tahun 2019 Hakim memeriksa Dispensasi Perkawinan hanya dilakukan oleh Hakim tunggal, bukan lagi hakim majelis sebagaimana pemeriksaan perkara perdata lainnya. Di samping itu Hakim tidak diperkenankan menggunakan baju Toga Sidang. Dengan kondisi hakim tunggal dan tidak mengenakan Toga sidang diharapkan si anak tidak merasa takut dan tertekan sepanjang jalannya persidangan sehingga ia bisa mengutarakan kehendak maksudnya dalam perkara yang sedang dijalaninya.

Asas kelima adalah “non-diskriminasi” standar baku umum bahwa Hakim harus memperlakukan sama semua orang di hadapan hukum. Hakim tidak boleh memperlakukan berbeda setiap anak yang menjadi subjek dalam perkara permohonan dispensasi kawin, misalnya karena berasal dari keluarga orang terpandang dan kaya. Dalam risalah Umar bin Khattab yang populer dituliskan bahwa seorang Hakim harus memperlakukan secara sama siapapun di hadapan hukum sehingga orang yang kaya/berkuasa tidak akan mengharapkan kecurangan Hakim dan orang miskin/lemah tidak berputus asa akan keadilan Hakim.³⁰

Asas keenam adalah “kesetaraan gender” yang mengharuskan Hakim memeriksa perkara Dispensasi Kawin memiliki rasa sensitif terhadap hal ini. Jaman sudah bergulir jauh sejak al Quran diturunkan pertama kali. Peran, kedudukan, dan kontribusi perempuan sudah nyaris seimbang dengan laki-laki bahkan ada yang sanggup melampaui. Dengan asas ini hakim tidak boleh memandang lemah calon istri yang hendak dimintakan dispensasi perkawinannya. Anak laki-laki dan perempuan sama harus ditakar kemampuannya terlebih dahulu di tahap konstantir ketika pemeriksaan perkara yang dilanjutkan dengan pembuktian.

Asas ketujuh adalah “Persamaan di depan hukum” sangat senafas dengan konten yang ada di dalam Risalah Umar. Dunia peradilan masa lalu tidak dapat dipungkiri ada indikasi bias gender dalam proses penanganan perkara. Oleh karenanya, Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan PERMA nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Dalam proses analisisnya yang dimulai sejak pemeriksaan awal hingga merumuskan putusan, seorang Hakim memeriksa perkara Dispensasi kawin harus mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja dan peran laki-laki dan perempuan, yang dalam hal ini mereka masih

³⁰ Aah Tsamrotul Fuadah, *Huku Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khatab*, 2nd ed. (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019). 195

anak-anak di bawah umur, dengan memperhatikan faktor sosial, pendidikan, dan budaya setempat.³¹

Asas kedelapan hingga kesepuluh adalah “keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum”. Ini adalah ruh dari setiap putusan dan penetapan Hakim yang dijatuhkannya. Keadilan adalah nilai sulit dinilai karena ia bentuknya abstrak dan tidak bisa diukur dengan angka deret. Namun, adanya keadilan dapat dirasakan oleh masyarakat pencari keadilan manakala putusan atau penetapan terkait dispensasi kawin dapat memberikan manfaat, misalnya secara ekonomi, manfaat kesehatan, manfaat pendidikan, dan lain sebagainya. Begitu juga keadilan bisa dirasakan manakala putusan/penetapan yang dijatuhkan memiliki kepastian hukum. Dengan adanya penetapan yang mengabulkan permohonan dispensasi kawin, maka anak-anak di bawah umur yang akan melakukan perkawinan akan dapat melangkah ke tahap selanjutnya dan dapat melakukan tindakan hukum lainnya pasca perkawinannya. Demikian juga bila permohonan dispensasi kawin yang diajukan ditolak oleh Hakim, maka subjek hukum (anak-anak) akan memulai babak baru dan mengakhiri niatnya untuk melakukan perkawinan hingga usia dibolehkannya melakukan akad perkawinan.

Dari kesepuluh asas yang dibebankan oleh peraturan kepada Hakim Pemeriksa dalam menangani perkara Dispensasi kawin dapat dianggap memenuhi upaya untuk mewujudkan kemaslahatan dua dimensi, yaitu kemaslahatan duniawi dan kemaslahatan ukhrowi. Hakim tidak boleh mengabulkan sebuah permohonan dispensasi kawin jika tidak terbukti bahwa perkawinan yang akan dilakukan dapat memberikan kemaslahatan duniawi. Boleh jadi jika perkawinan dipaksakan agar terlaksana hanya mendapat kemaslahatan ukhrawi, yakni terhindar dari dosa zina. Akan tetapi, mereka (anak-anak) akan menjalani kehidupan yang berat. Akan banyak kebutuhan *dhoruri* yang tidak terpenuhi, misalnya kesehatan organ reproduksi terancam karena belum matang terpaksa hamil, kesehatan mental karena laki-laki yang masih di bawah umur harus menanggung beban tanggung jawab sebagai suami.

Negara juga mengambil langkah moderat yang akomodatif dalam menyelesaikan perkara perkawinan anak-anak di bawah umur. Tidak bisa dipungkiri ketika anak-anak sudah memiliki perasaan suka kepada lawan jenis yang kuat, maka upaya melarang semata akan menjadi bumerang bagi orang tua dan anak itu sendiri. Pergaulan seks bebas akan memberikan

³¹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017

kemadhorotan yang lebih luas di tengah masyarakat. Oleh karena itu, orang tua/wali berbagi tanggung jawab mengurus rumah tangga dengan si anak. Tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga tidak dibebankan seutuhnya kepada si anak, melainkan orang tua/wali juga turut wajib membantu dan membimbing mereka. Sehingga pengantin baru yang masih di bawah umur, dapat tetap bertumbuh dan berkembang secara normal dan wajar serta tetap mendapatkan pemenuhan hak-hak dasar sebagai manusia, yaitu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Inilah langkah negara memberikan *win-win solution* kepada warganya sehingga unsur-unsur penjagaan terhadap agama, nyawa (kehidupan), harta, akal sehat, dan keturunan dapat terpenuhi guna menggapai maslahat dunia dan akhirat.

Penutup

Agama Islam adalah agama yang memberikan kemanfaatan dan kebaikan bagi umat manusia baik untuk kehidupannya di dunia maupun di akhirat. Salah satu perbuatan untuk meraih itu adalah lembaga perkawinan. Dari masa ke masa pelaksanaan akad-akad perkawinan mengalami perubahan dan modifikasi bentuknya. Termasuk dalam ajaran Islam mengalami modifikasi terkait pembatasan umur minimal dibolehkannya melakukan perkawinan. Melalui organ-organ negara, kebijakan pembatasan umur ini dilakukan dan diterapkan terhadap masyarakat Indonesia. Hasilnya adalah setiap laki-laki atau perempuan yang belum genap berumur 19 tahun dilarang melakukan perkawinan. Apabila tetap ingin melakukannya, maka harus mendapat persetujuan Pengadilan dalam bentuk Penetapan.

Dalam proses membuat penetapan oleh Hakim di pengadilan, para hakim tersebut harus mentaati prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan oleh negara. Terdapat 10 asas yang harus dipenuhi dalam setiap pemeriksaan perkara yang disidangkan. Seluruh 10 macam asas-asas tersebut selaras dengan 5 kaidah dalam *maqashid al Syariah* yang digagas oleh imam al Syatibi, yaitu *hifdz al diin*, *hifdz al nafs*, *hifdz al aql*, *hifdz al nasl*, dan *hifdz al maal*. Kesepuluh asas dan kelima kaidah tersebut semuanya berada dalam koridor *dhorury* yang harus dijaga, dipenuhi, dan dipelihara keberlangsungannya.

Daftar Pustaka

- Aah Tsamrotul Fuadah, *Huku Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khatab*, 2nd ed. (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019)
- Agus Satory Hotma Pardomuan Sibuea, "Problematika Kedudukan Dan Pengujian Peraturan Mahkamah Agung Secara Materiil Sebagai

- Peraturan Perundang-Undangan,” *PALAR (Pakuan Law Review)* 06, no. 1 (2020)
- Ahmad Raisuni, *Nazariyyat al-Maqasid inda al-Syatibi*, (Herndon-Virginia: The International Institute of Islamic Thought, 1995)
- Al Mawardy, *Kitab Al-Hawi Al-Kabir*, 1st ed. (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 1994)
- Al-Sarakhsi, *Kitab al Mabsuth*, juz 5, (Beirut: Darul Makrifah)
- Al Syatibi, *Al-Muwafaqat*, juz I, (Dar Ibn Affan)
- Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syari'ah Menurut al-Syatibi*, PT. Rajagrafindo Persada , 1996
- Ani Yumarni and Endeh Suhartini, “Perkawinan Bawah Umur Dan Potensi Perceraian (Studi Kewenangan KUA Wilayah Kota Bogor),” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26, no. 1 (2019)
- Badan Pusat Statistik, “Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda”. Badan Pusat Statistik 6–10 (2020)
- Edwin Hadiyan, “Membangun Kesadaran Masyarakat Mengenai Tradisi Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Hak Anak,” *Jurnal Studi Gender dan Anak* 3, no. 1 (2017)
- Fathur Rohman, “*Maqasid Syariah dalam Perspektif al-Syatibi*,” E-Jurnal: ISTIDAL Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 4 No. 2 ISSN: 2356-0150 (Desember 2017)
- Hamsah Hudaf Agung Kurniawan, “*Konsep Maqasid Syari'ah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat*” *al Mabsut* 15, no. 1 (2021)
- Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, ed. Wildan, 2nd ed. (Bantul: Ladang Kata, 2020).
- Mausuah al Fiqhiyah al kuwaity, juz 41
- Melis, “Pemikiran Tokoh Ekonomi Muslim: Imam Al-Syatibi,” *Islamic Banking* 2, no. 1 (2016)
- Muhammad bin Ismail Abu ‘Abd Allah Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari, Dar Al-Fikr*, 1st ed. (Beirut: Darul Ibnu Kathir, 2002)
- Mukhoyyaroh Yunus, Muh. Idris, “Pernikahan Di Bawah Umur Pada Masyarakat Pesisir Malangke,” *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, LAI Al-Qolam* 3, no. 2 (2020): 43–51.
- Musolli, “Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer,” *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2018)
- Wahbah Zuhaili, “*Al- Fiqh Al- Islāmy Wa Adillatuhu Juz VII*” (Dimasyq: Darul Fikr, 1985)
- Undang-undang nomor 32 tahun 1954 jo. Undang-undang nomor 22 tahun 1946
- Putusan Mahkamah Konsitusi nomor 22/PUU-XV/2017
- KMA/104A/SK/XII/2006 tanggal 22 Desember 2006, tentang Pedoman Perilaku Hakim dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 215/KMA/SK/XII/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim.

Achmad Kadarisman,
Tutik Hamidah

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017